

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro. Kedudukan perangkat daerah ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi tersebut, dinas memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan sektor kebudayaan serta pariwisata daerah. (dinbudpar.bojonegorokab.go.id)

Dalam konteks penelitian berjudul “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan Destinasi Wisata Padangan Heritage”, pemahaman terhadap tupoksi dinas menjadi penting karena keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pemerintah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pembangunan destinasi, promosi, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. (dinbudpar.bojonegorokab.go.id)

Tugas pokok dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bojonegoro terhadap padangan heritage kepala dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam

melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Secara umum, tugas tersebut mencakup:

1. Perumusan kebijakan bidang budaya dan pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan bidang budaya dan pariwisata
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas lain dari bupati sesuai dengan fungsi kelembagaan dinas.

Apabila dikaitkan dengan padangan heritgae, tugas pokok tersebut menunjukkan bahwa dinas tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai aktor utama dalam dalam pembangunan destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya melalui penyusun kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan kawasan wisata. (dinbudpar.bojonegorokab.go.id)

Fungsi bidang pariwisata terhadap padangan heritage, dalam pengembangan destinasi wisata, fungsi paling strategis berada pada bidang pariwisata. Berdasarkan data resmi pemerintah kabupaten bojonegoro, bidang pariwisata memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan lingkup kepariwisataan. Fungsi bidang ini meliputi:

1. Pemeliharaan padangan heritgae

Dinas mempunyai kewenangan dalam merencanakan, mengembangkan, dan memelihara destinasi wisata termasuk pengadaan sarana-prasarana pendukung. Hal ini berkaitan langsung dengan penguatan kapasitas kelembagaan, karena kemampuan organisasi dalam menyediakan fasilitas, aksesibilitas, dan tata kelola kawasan akan menentukan kualitas destinasi.

2. Perencanaan dan pengembangan padangan heritage:

Dinas bertanggung jawab melakukan perencanaan pengembangan objek dan daya tarik wisata agar memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam konteks padangan heritage, fungsi ini dapat diwujudkan melalui revitalisasi kawasan heritage, penguatan atraksi sejarah, dan pengembangan wisata edukasi berbasis sejarah lokal.

3. Promosi dan pemasaran pariwisata:

Fungsi lain yang sangat penting ialah pemasaran destinasi wisata baik melalui media cetak, elektronik, maupun kerja sama promosi antar daerah. Dalam konteks padangan heritage, lemahnya promosi dapat menjadi hambatan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, sehingga kapasitas kelembagaan dalam aspek komunikasi, digital marketing, dan branding destinasi menjadi indikator penting penelitian.

4. Penyediaan data kunjungan dan informasi pariwisata:

Dinas juga bertugas melaksanakan pendataan kunjungan wisatawan, penyediaan informasi, dan analisis pasar wisata. fungsi ini penting karena pengambilan kebijakan pengembangan destinasi harus basis data (evidence based policy), termasuk evaluasi keberhasilan pengembangan padangan heritage melalui tren kunjungan dan dampak ekonomi masyarakat. (dinbudpar.bojonegoro.go.id)

GAMBAR.1

Kantor dinbudpar kabupaten bojonegoro



Sumber: (Dokumentasi peneliti)

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam

konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata melalui kelembagaan yang efektif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. (bojonegoro.com)

Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar namun belum dikembangkan secara optimal adalah Padangan Heritage. Padangan Heritage merupakan bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1911 dan memiliki nilai historis serta budaya yang tinggi. Bangunan ini tidak hanya mencerminkan arsitektur kolonial yang unik, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perkembangan perdagangan di wilayah Bojonegoro (Radarbojonegoro.com). Saat ini, Padangan Heritage telah difungsikan sebagai destinasi wisata sejarah dan museum lokal yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

GAMBAR 2

Bangunan Padangan Heritage



(sumber: kompasiana.com)

Salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Padangan Heritage. Destinasi ini merupakan Kawasan Wisata berbasis sejarah dan budaya yang mulai dikembangkan pada tahun 2021 dan memiliki potensi besar sebagai wisata edukasi dan heritage di kabupaten Bojonegoro(sisparnas.kemenparekraf.go.id). padangan heritage menawarkan konsep wisata berbasis sejarah lokal yang dapat menjadi daya tarik unik bagi wisatawan, sekaligus sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah. Pengembangan wisata berbasis heritage memiliki karakteristik yang berbeda dengan wisata lainnya, karena memerlukan pendekatan yang lebih kompleks, terutama dalam hal pelestarian nilai sejarah, pengelolaan aset budaya, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi heritage dapat berjalan secara berkelanjutan dan bermanfaat kepada masyarakat lokal atau di sekitar destinasi wisata.

Dalam praktiknya, pengembangan Padangan Heritage masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya sarana pendukung wisata, serta belum optimalnya promosi dan pengelolaan destinasi. Data menunjukkan bahwa fasilitas dasar di padangan heritage masih terbatas, seperti minimnya pusat informasi, fasilitas parkir, dan sarana pendukung lainnya (sisparnas.kemenparekraf.go.id). kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan destinasi padangan heritage masih memerlukan perhatian serius dari pemerintahan daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Merilee S. Grindle (1997), capacity building merupakan proses

peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) merupakan proses meningkatkan kemampuan suatu organisasi agar mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sektor pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup penyempurnaan struktur organisasi, kepemimpinan, sistem kerja, sarana dan prasarana, tata kelola, serta budaya organisasi (Merilee S. Grindle. (1997)).

Dalam konteks pengembangan pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi aspek penting karena keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi objek wisata, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pengelola dalam merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mempromosikan, serta mengevaluasi pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat inisiatif dari komunitas lokal yang berupaya mengembangkan wisata berbasis heritage melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, seperti program walking tour yang mengangkat sejarah lokal Bojonegoro. Inisiatif ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan wisata heritage sangat besar jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan kolaboratif (Bojonegorohistory.or.id,2025). Salah satu program unggulan Bojonegoro history

adalah pengembangan kawasan wisata heritage atau yang disebut Bojonegoro Walkingtour. Program ini berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di sejumlah titik bersejarah di wilayah Bojonegoro. Dengan pendekatan berbasis data dan sejarah, komunitas ini berusaha mendorong integrasi antara pelestarian budaya dengan pengembangan potensi pariwisata lokal berkelanjutan. Dengan semangat kolaboratif dan semangat literasi sejarah, Bojonegoro history menjadi salah satu motor penggerak pelestarian identitas Bojonegoro, sekaligus ruang belajar terbuka bagi generasi muda yang ingin terlibat aktif dalam menjaga warisan leluhur dari berbagai aktivitas kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di indikasikan bahwa pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata sebagai pengelola utama. Kelemahan dalam kapasitas kelembagaan akan berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan wisata.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata sebagai pengelola utama. Kelemahan dalam kapasitas kelembagaan akan berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan wisata.

menganalisis bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata

Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan destinasi wisata Padangan Heritage. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen pariwisata dan penguatan kelembagaan.

TABEL 1
DATA PERMASALAHAN

No.	Indikator Kapasitas Kelembagaan	Data/Kondisi Permasalahan	Kaitan dengan Teori	Dampak terhadap Pengembangan Padangan Heritage
1.	Struktur Organisasi	Pembagian tugas dan fungsi dalam pengembangan Padangan Heritage belum sepenuhnya spesifik dan terintegrasi. Pengembangan destinasi melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengelola, Pokdarwis, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha, tetapi pembagian peran dan kewenangan antaraktor	Menurut Horton et al. (2003), kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam mengatur struktur, pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hubungan kerja. Grindle (1997) juga menempatkan penguatan organisasi sebagai bagian penting dari capacity building. Apabila struktur dan pembagian peran tidak jelas, kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan akan menjadi kurang optimal.	Dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, lemahnya koordinasi, dan kurang fokusnya pelaksanaan program pengembangan Padangan Heritage. Pengembangan destinasi menjadi bergantung pada koordinasi antaraktor yang belum sepenuhnya terintegrasi.

		masih membutuhkan kejelasan yang lebih kuat.		
2.	Kepemimpinan	Koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola destinasi, masyarakat, Pokdarwis, komunitas sejarah, UMKM, dan pihak lainnya masih perlu diperkuat. Kepemimpinan dalam pengembangan Padangan Heritage belum sepenuhnya membentuk mekanisme koordinasi lintas sektor yang rutin dan terstruktur.	Dalam perspektif Horton et al. (2003), kapasitas kelembagaan membutuhkan kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya dan menjalankan program secara efektif. Kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mengarahkan, menggerakkan, dan mengoordinasikan berbagai sumber daya tersebut. Sejalan dengan Grindle (1997), penguatan kapasitas organisasi membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk mengelola proses pembangunan secara efektif.	Kurangnya koordinasi dapat menghambat integrasi program, memperlambat pengambilan keputusan, dan menyebabkan program pengembangan destinasi belum berjalan secara terpadu.
3.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan wisata heritage masih perlu ditingkatkan.	Menurut Horton et al. (2003), SDM merupakan bagian penting dari kapasitas kelembagaan yang mencakup kompetensi, motivasi, dan	Keterbatasan kompetensi dapat memengaruhi kualitas pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan,

		Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya terkait administrasi pariwisata, tetapi juga pengelolaan destinasi heritage, pemanduan wisata, storytelling sejarah, interpretasi warisan budaya, pelayanan wisatawan, pemasaran digital, media sosial, dan pengembangan paket wisata.	kemampuan individu dalam melaksanakan tugas. Grindle (1997) menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu dimensi utama capacity building. Dengan demikian, keterbatasan kompetensi SDM menunjukkan bahwa aspek kapasitas individu masih perlu diperkuat.	penyampaian informasi sejarah, promosi digital, dan kemampuan menciptakan inovasi wisata heritage.
4.	Sarana dan Prasarana	Fasilitas pendukung wisata di Padang Heritage masih perlu ditingkatkan. Dalam dokumen penelitian disebutkan adanya keterbatasan fasilitas pendukung, termasuk kebutuhan fasilitas parkir, pusat informasi, papan	Menurut Horton et al. (2003), kapasitas kelembagaan juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program. Sarana dan prasarana merupakan sumber daya pendukung yang memungkinkan organisasi menjalankan fungsi secara	Keterbatasan fasilitas dapat mengurangi kenyamanan wisatawan, membatasi kualitas pengalaman wisata, menghambat penyampaian informasi sejarah, serta mengurangi daya tarik Padang Heritage sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya.

		interpretasi sejarah, papan petunjuk, toilet, tempat istirahat, keamanan, serta pemanfaatan teknologi digital.	efektif. Dalam perspektif Grindle (1997), penguatan kapasitas organisasi tidak hanya berkaitan dengan SDM, tetapi juga penguatan sumber daya dan kemampuan organisasi dalam menjalankan program.	
5.	Sistem dan Prosedur Kerja	Sistem dan prosedur pengelolaan Padang Heritage masih perlu diperkuat, khususnya dalam penyusunan SOP pengelolaan destinasi, perencanaan program secara terintegrasi, monitoring, dan evaluasi. Sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terstandarisasi berpotensi menyebabkan pelaksanaan program belum konsisten.	Horton et al. (2003) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan mencakup sistem, proses, dan mekanisme kerja yang mengatur interaksi antarbagian organisasi dalam mencapai tujuan. Sementara itu, Grindle (1997) menekankan pentingnya pengembangan sistem dan kebijakan sebagai bagian dari capacity building. Dengan demikian, penguatan SOP, perencanaan, monitoring, dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan.	Tidak adanya sistem kerja yang terintegrasi dan prosedur yang jelas dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak seragam, monitoring kurang optimal, evaluasi tidak berkelanjutan, serta sulit mengukur keberhasilan pengembangan Padang Heritage.

(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan dokumen penelitian dan teori Horton et al. (2003) serta Grindle (1997).)

Berdasarkan tabel permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, manajerial, dan kultural.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pemecah masalah yang ada dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang ingin dilakukan harus berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam pencarian informasi awal. Walaupun diakui bahwa masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian (Truckman, 1988). Apabila peneliti menemukan masalah, maka dapat dikatakan peneliti telah melaksanakan separuh dari proses penelitian karena telah ditemukan suatu masalah maka peneliti dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah.

Setelah ditemukan suatu masalah maka penelitian dapat segera dilakukan oleh peneliti dengan lebih mudah. Jika terjadi penyimpangan yang ada dalam kenyataan pelaksanaan dilapangan sehingga tujuan yang seharusnya dicapai tidak terealisasi maka keadaan tersebut dapat disebut suatu masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan teori tentang rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang

akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: “PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PADANGAN HERITAGE”

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan di buktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalam pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penguatan kapasitas kelembagaan oleh dinas pariwisata tentang pengembangan destinasi wisata padangan heritage yaitu, perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi. tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan baru melalui proses penemuan, pembuktian, dan pengembangan, serta untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang diteliti.

2. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata di kabupaten bojonegoro, khusus terkait destinasi wisata padangan heritage

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalam pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga destinasi wisata padangan heritage yang di kelola oleh dinas pariwisata kabupaten Bojonegoro,

1) Bagi mahasiswa

Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai penelitian. Menyediakan referensi data awal bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik serupa, baik di kabupaten bojonegoro maupun daerah lain yang ada persoalan tentang wisata heritage

2) Bagi Universitas Bojonegoro

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian yang akan datang dengan topik tentang penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan Destinasi wisata Padangan Heritage.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab Satu, merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan Bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan Dinas pariwisata kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan destinasi wisata padangan heritage. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Bagaimana penguatan kapasitas kelembagaan dinas pariwisata kabupaten bojonegoro dalam pengembangan destinasi wisata padangan heritage

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang di lakukan. Dengan adanya bab pentup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan oleh penelitian tersebut.